**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU**

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**Artikel ilmiah Tesis**

**Disusunoleh :**

**Nama : SyifaNurAgustina**

**Npm : 168040030**

**Konsentrasi : HukumPidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2019**

**ABSTRAK**

Adalah hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak nya secara kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 28Cayat (2) Undang-UndangDasar 1945), dan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Adalah hak setiap warga Negara Republik untuk mencari pekerjaan baik di wilayah Negara Negara Republik Indonesia maupun keluar negeri.Mengingat pembangunan yang dilaksanakan dinegara Republik sebagaian besar terpusat dipulau jawa, sehingga banyak rakyat dari perdesaan-perdesaan mencari pekerjaan di pulau jawa.Sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, persaingan yang sedemikian hebatnya dalam mencari pekerjaan, ditambah lagi pendidikan yang rendah,kurangnya pengalaman dalam bekerja, maka tidak menutup kemungkinan warga Negara Republik Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri antara lain Malaysia, Singapore dan lain-lainnya. Namun demikian keinginan WNI untuk mencari pekerjaan di luar negeri adalah sah-sah saja asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Tanpa mengindahkan ketentuan dalam undang-undang keimigrasian itu berarti merupakan (*illegal entry*). Identifikas imasalahnya adalah : 1. Bagaimanakah penegakan hokum pidana terhadap penyelundupan TKI keluar negeri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia (TKI) keluar negeri.

Metode penelitian merupakan diskriptif analitis, suatu penelitian yang mengambaarkan, menganalis secara sistematis dengan pendekatan yuridis normatife terhadap masalah yang menjadi objek pembahasan.

 Penegakan hukum pidana (*law enfor cement*) harus dilakukan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (TKI) keluar. Bilamana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia (TKI) keluar negeri, maka pelaku-pelakunya harus dimintakan pertanggung jawaban di muka hakim (pengadilan). 2. Berbagai factor terjadinya tindak penyelundupan manusia (TKI) keluar negeri adalah factor geografis, ekonomis, kemiskinan, pendidikan, kebodohandan lain-lain.

Kata kunci : Tenaga \Kerja \Indonesia, Penegakan \Hukum, Penyelundupan \Manusia.

***ABSTRACT***

*It is right of each individual to promote her- or himself in fighting for collective rights, to build up people, nation, and state (Article 28C paragraph (2) of 1945 Constitution) and, therefore, everyone deserve a job, reward, and fair treatment in relation to the work (Article 28C paragraph (2) of 1945 Constitution). It is right of each Indonesian citizen to seek for a job in either domestic area or abroad. Recall most of development in Indonesia is centralized to Java Island; the people in great quantities coming from rural area were seeking for jobs in the Java Island. Given the limited opportunities for employment, considerable competition for a job, plus low education, and the lack of job experience, all make possible for Indonesian citizens to seek for a job in foreign countries such as Malaysia, Singapore, etc. Nevertheless, the Indonesian citizen’s pretension for a job in abroad is just valid, providing he or she satisfies provisions contained in legislation (Immigration Law Number 5 of 2011). Disregard of provisions in the immigration law is illegal entry. The problems to be identified are: 1. How law enforcement on the smuggling of Indonesian blue-collar workers and craftsmen in overseas under Immigration Law Number 6 of 2011? 2. What factors are leading to criminal act of human (Indonesian blue-collar workers and craftsmen) smuggling in overseas?*

*Method used in this study is analytical descriptive, a study describing, systematically analyzing using normative juridical approach to an issue being the object of discussion.*

*Conclusions: 1. Law enforcement should be applied to criminal actors of human (Indonesian blue-collar workers and craftsmen) smuggling in overseas. When they are proven legally and convincingly did a criminal act of human (Indonesian blue-collar workers and craftsmen) smuggling in overseas, the actors must be demanded for their responsibilities before judge (the court). 2. Some factors causing criminal act of human (Indonesian blue-collar workers and craftsmen) smuggling in overseas are geographical, economic, property, educational, idiocy, etc.*

*Keyword: Indonesia workers, law enforcement, human smuggling..*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU**

Anthon F. Susanto. *Membangun System Peradilan Pidana Indonesia*. Litigasi Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 No 1. Bandung 2002.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bandung 2003;

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung 2003;

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2000.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengngaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali Jakarta 1986, hlm 3

1. **SUMBER LAIN**

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan I,II,III dan IV Dalam Satu Naskah, Penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004;